



Satrantas Tipikor Geledah Gedung Dewan

80 Bendel Dokumen Disita

Denpasar (Bali Post) -

Tim Satuan Tugas Khusus Pemberantasan (Satrantas) Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menggeledah Gedung DPRD Denpasar beralamat di Jalan Melati, Denpasar, Senin (23/1) kemarin. Penggeledahan dilakukan hampir bersamaan dengan sidang kasus korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar dengan terdakwa PPTK (Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan) I Gusti Made Patra di Pengadilan Tipikor. Penggeledahan dipimpin langsung tiga pejabat, Kasi Intel dan Humas Gusti Agung Kusumadiputra, Kasipidsus Syahru Wira, Kasidatun Sauca Arimbawa, dan jaksa-jaksa yang tergabung dalam jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Selama tiga jam mengobok-obok rumah wakil rakyat itu, setidaknya belasan petugas kejaksaan menyita 80 bendel berkas dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perdin DPRD Kota Denpasar tahun 2013. Selain dimasukkan ke dalam koper, berkas itu juga dimasukkan ke dalam kardus, kotak besar, dan sejumlah tempat lainnya. Hingga pukul 17.00 Wita, saat keluar dari gedung, petugas kejaksaan yang mengenakan rompi Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi membawa dan memasukkan barang bukti itu ke dalam empat mobil untuk selanjutnya dibawa ke Kejari Denpasar di Jalan P.B. Sudirman.

Kasipidsus Syahru Wira ditemani Agung Kusumadiputra dan Sauca Arimbawa mengatakan, penggeledahan Sekretariat DPRD



Bali Post/asa

DOKUMEN - *Petugas dari Satrantas Korupsi Kejari Denpasar mengangkut dokumen terkait kasus perdin ke dalam mobil usai menggeledah Gedung DPRD Denpasar, Senin (23/1) kemarin.*

Denpasar itu dilakukan setelah pihak kejaksaan mendapatkan surat penetapan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Denpasar yang mewilayahi Pengadilan Tipikor Denpasar, dan surat tugas serta perintah penggeledahan dari Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri. "Penggeledahan ini terkait dengan pengembangan dan pemberkasan kasus perdin DPRD Kota Denpasar dengan tersangka Sekwan I Gusti Rai Suta," ucap Syahru.

Data yang didapat ini akan digunakan untuk melengkapi data yang sudah ada. Pasalnya, tidak lama lagi pemberkasan Rai Suta akan dilakukan untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan. "Pemeriksaan Rai Suta sebentar lagi akan kami lakukan yang katanya dia sedang sakit," sambung Syahru.

Syahru mengatakan, dokumen yang disita semua yang berkaitan dengan perdin tahun 2013. "Yang

berkaitan dengan perdin kita ambil, kita geledah ruangnya. Manakala datanya belum ada kita ambil, kalau sudah ada kita biarkan," ucap Syahru.

Apakah dokumen ini (yang disita) tidak berkaitan dengan terdakwa Patra, mengingat *locus*-nya sama? Syahru bersama Kusumadiputra mengatakan berbeda. "Berbeda. Sidang Patra dengan dokumen yang ada dan sudah disita. Yang ini dokumen berkaitan dengan Rai Suta, tidak ada yang sama," tegas Syahru.

Menurut Kasipidsus, dalam kasus ini tersangka Sekwan DPRD Denpasar Rai Suta berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA). "Yang bersangkutan juga sebagai Satker DPRD Kota Denpasar, di mana dalam memfasilitasi perdin ini ada menggunakan pihak ketiga yakni *travel*," jelasnya. Dengan disitanya sejumlah dokumen, tim penyidik sekarang fokus untuk pemberkasan dengan tersangka Sekwan Rai Suta. (kmb37)

Edisi : Selasa, 24 Januari 2013

Hal : 2



Tuntaskan Tunggakan Korupsi

PENANGANAN perkara korupsi tidak gampang. Semua butuh proses. Di samping memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan data yang valid didukung fakta autentik, juga harus melibatkan BPKP untuk menghitung kerugian negara. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali **Dr. H. Abdul Muni, S.H., M.Hum.** saat ditanya penanganan kasus korupsi di Bali, Senin (23/1) kemarin. Pasca melimpahkan sejumlah kasus korupsi pada tahun 2016, orang nomor satu di korps Adhyaksa Bali ini berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan kasus korupsi pada tahun 2017 ini. Apalagi, perkara korupsi menjadi perhatian publik dan ini merupakan program pemerintah. Lantas, mengapa banyak perkara yang belum terselesaikan bahkan ada yang prosesnya lama? "Ini yang saya maksud. Penanganan perkara korupsi itu panjang. Belum lagi pendapat BPKP, ahli, dan ekspos yang dilakukan tim," ucap Abdul Muni. Mantan Wakajati NTT itu menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi tanpa pilih kasih atau intervensi oleh siapa pun. Selama ini pihak kejaksaan di seluruh Bali banyak membawa perkara bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Terkait hal itu, Abdul Muni mengatakan bahwa semua dana bantuan pemerintah harus dilakukan pengawasan. "Bansos diawali proses mengajukan proposal. Mereka yang menerima bansos juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan proposal yang diajukan," ucap Kajati Abdul Muni. Pria yang menakhodai Kejati Bali sejak satu tahun satu bulan itu akan melakukan pengawasan terhadap pencairan bansos dan kejaksaan harus ikut memonitoring bansos tersebut. "Harapan saya, penyaluran bansos tidak disalahgunakan. Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pidana korupsi jika penggunaan sesuai dengan proposal yang diajukan," harap pria yang menjabat saat kasus pembunuhan Engline sedang bersidang di PN Denpasar itu. (asa)

Edisi : Sabtu, 24 Januari 2017

Hal : 2